

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara tentu melakukan pembangunan untuk negaranya. Pada hakikatnya, pembangunan dapat dijelaskan sebagai proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Tujuannya tentu untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari keadaan semula. Siagian (1994) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan segala usaha yang dilakukan sebuah negara untuk bertumbuh kembang serta merubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan serta penghidupan negara yang bersangkutan dalam mencapai tujuan akhir. Namun pada implementasinya, pembangunan yang dilakukan suatu negara selalu dikaitkan dengan peningkatan ekonomi saja. Padahal nyatanya, pembangunan tidak hanya sekedar meningkatkan pendapatan per kapita penduduk saja. Pembangunan yang baik juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan itu sendiri dengan kelestarian lingkungan. Isu mengenai lingkungan hidup dan pelestarian alam ini merupakan isu penting dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam skala nasional maupun internasional. Konsep pembangunan tersebut dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Conference on the Human Environment yang diadakan oleh *United Nation* (UN) atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Stockholm pada 1972 adalah

awal dari sejarah panjang pembangunan berkelanjutan. Indonesia turut hadir dalam konferensi tersebut, bersama dengan delegasi negara maju maupun berkembang. Hasilnya adalah kesepakatan bahwa perlu adanya pertimbangan masalah lingkungan dalam semua program pembangunan yang selama ini dijalankan. Menurut sebuah laporan berjudul *Our Common Future* atau *Brundtland Report* yang dipublikasikan melalui *World Conference on Environment and Development* (WCED) tahun 1987, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai proses pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pada masa sekarang dengan tidak mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Pengertian ini juga lah yang dipakai sampai sekarang.

Di Indonesia, pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sudah sangat berkembang serta merupakan salah satu rujukan di berbagai aspek pembangunan. Satu diantaranya adalah pada pembangunan di sektor lingkungan. Kelestarian lingkungan sendiri adalah salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Pertambahan jumlah masyarakat serta intensitas ataupun ragam kegiatan yang dilakukan sangat berpengaruh pada degradasi lingkungan. Salah satu permasalahan nyata yang merupakan akibat dari peningkatan aktivitas manusia adalah sampah.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam Bahasa Inggris, sampah disebut *waste*, yaitu material atau bahan yang tidak lagi memiliki kegunaan atau nilai ekonomis oleh pemiliknya sehingga harus dibuang. Jika dikaitkan dengan perspektif lingkungan yang lingkupnya lebih luas, sampah dimaknai sebagai bahan yang dalam keadaan biasa atau khusus tidak bisa digunakan karena tidak bernilai akibat cacat, rusak atau berlebihan sehingga harus dibuang. Proses timbulnya sampah adalah konsekuensi alami dari kehidupan manusia yang terus berkembang. Migrasi dan urbanisasi yang disebabkan oleh industrialisasi masif juga turut meningkatkan produksi sampah padat (*solid wasted*) setiap harinya terutama di daerah perkotaan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang dalam mengejar status sebagai negara industry pada tahun 2020, jumlahnya pun terus meningkat secara signifikan.

Salah satu pemicu berubahnya komposisi serta kuantitas sampah yang diproduksi adalah perubahan gaya hidup masyarakat modern yang serba praktis. Berdasarkan Sumber Timbulan Sampah tahun 2018, sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar yaitu 62%. Diikuti dengan pasar tradisional 13%, pusat perniagaan 7%, kantor 5%, kawasan 4%, fasilitas publik 3% dan sisanya 6% berasal dari lainnya. Hal ini tentu bukan tanpa sebab. Sampah rumah tangga memang relatif lebih sulit dikelola atau ditangani karena

jenisnya yang sangat beragam, tercampur dan sebagian besar merupakan sampah basah.

Permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan sampah tentu dirasakan oleh banyak daerah di Indonesia. Terutama pengelolaan sampah rumah tangga itu sendiri. Salah satunya adalah Kabupaten Semarang. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, sampah rumah tangga juga merupakan jenis sampah terbanyak.

Tabel 1. Data Sampah Masuk TPA Blondo 2019

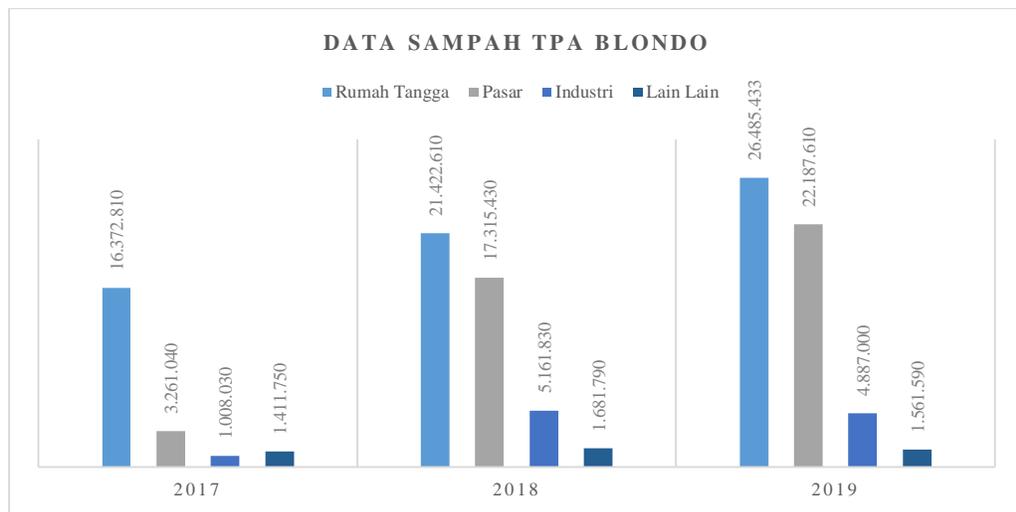
Bulan	RT	Pasar	Industri	Lain Lain	Kg	Ton	m ³
Januari	2.234.370	1.973.510	660.470	209.840	5.078.190	5.078	20.313
Februari	2.012.670	1.890.510	592.030	130.760	4.625.970	4.626	18.504
Maret	2.757.490	2.283.810	765.400	250.730	6.057.430	6.057	24.230
April	1.990.600	1.800.410	433.040	120.300	4.344.350	4.344	17.377
Mei	2.200.210	1.947.110	650.050	209.270	5.006.640	5.007	20.027
Juni	1.880.500	1.820.450	134.100	100.270	3.935.320	3.935	15.741
Juli	1.919.500	1.808.440	144.400	100.280	3.972.620	3.973	15.890
Agustus	1.929.500	1.823.440	147.400	102.280	4.002.620	4.003	16.010
September	1.940.450	1.900.310	296.040	98.840	4.235.640	4.236	16.943
Oktober	2.265.673	1.510.440	362.290	203.860	4.342.263	4.342	17.369
November	2.537.420	1.596.580	332.680	17.210	4.483.890	4.484	17.936
Desember	2.817.050	1.832.600	369.100	17.950	5.036.700	5.037	20.147
Jumlah	26.485.433	22.187.610	4.887.000	1.561.590	55.121.633	55.122	220.487

Sumber: Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang

Berdasarkan data sampah masuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blondo yang berada di Bawen Kabupaten Semarang diatas menunjukkan data jumlah masing-masing jenis sampah pada tahun 2019. Dari jenis sampah yang diklasifikasikan di tabel diatas, sampah rumah tangga adalah jenis sampah

terbanyak di Kabupaten Semarang dibanding dengan jenis lain seperti sampah pasar, industri maupun lain-lain. Angka itu pun sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya sampah rumah tangga, sampah lain-lain pun juga meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 1. Data Sampah TPA Blondo 2017-2018



Sumber: Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang

Untuk menanganinya, upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang dilakukan dengan berbagai cara. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa tujuan pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sebagai sumber daya. Berdasarkan tujuan inilah pemerintah Kabupaten Semarang berupaya untuk mengarahkan masyarakat pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah tersebut meliputi kegiatan 3R yaitu *reduce*, *reuse* dan *recycle*.

Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir. Sosialisasi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah telah banyak dilakukan dengan berbagai program, salah satunya yaitu pembentukan Bank Sampah.

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah, disebutkan bahwa Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah (Unilever Indonesia, 2014). Pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 48 ayat (1) dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bentuk peran yang dimaksud dijelaskan pada ayat (4) di Pasal yang sama melalui 8 cara dan salah satunya adalah melalui Bank Sampah. Sistem manajemen sampah berbasis komunitas ini diharapkan dapat menangani masalah sampah sedini mungkin dengan melibatkan partisipasi komunitas atau masyarakat sendiri. Penanganan sampah mulai dari tempat terbentuknya sampah menjadi salah satu tujuan agar tidak terjadi penumpukan sampah di

tempat pembuangan. Kastaman dalam Suryani (2014) mendefinisikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2016-2021, salah satu indikator kinerja di bidang peningkatan kapasitas lingkungan adalah tentang Bank Sampah itu sendiri. Ditargetkan adanya peningkatan jumlah Lembaga Bank Sampah sebesar 35 lembaga pada 2016 dan 40 lembaga di setiap tahunnya mulai dari tahun 2017-2021. Dalam implementasinya, Bank Sampah sudah didirikan di beberapa daerah di Kabupaten Semarang. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, terdapat 146 Bank Sampah yang terdiri dari 1 Bank Sampah Induk dan 145 Bank Sampah Unit sampai dengan bulan Mei tahun 2020.

Salah satu Bank Sampah yang aktif melakukan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang adalah Bank Sampah yang penulis pilih sebagai tempat penelitian, yaitu Bank Sampah Soka Resik yang berada di Dusun Soka, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Selain karena Bank Sampah Soka Resik merupakan Bank Sampah yang aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah, Bank Sampah Soka Resik dipilih menjadi situs penelitian karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari kediaman penulis. Hal ini menjadi pertimbangan karena kegiatan penelitian dilakukan saat

pandemi Covid-19. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang pun menyarankan beberapa nama Bank Sampah untuk diteliti yang masuk dalam daftar 3 Bank Sampah tertua di Kabupaten Semarang, salah satunya adalah Bank Sampah Soka Resik. Bank Sampah Soka Resik pun merupakan Bank Sampah pioneer di Kabupaten Semarang yang secara konsisten melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah sejak awal berdirinya. Pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat ini sudah dilakukan oleh warga Dusun Soka, Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang sejak tahun 2013. Sejak tahun berdirinya, Bank Sampah ini baru memiliki gedung pada 2 tahun setelahnya di tahun 2015. Sampai dengan data terakhir yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, Bank Sampah Soka Resik sudah memiliki 180 nasabah. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan pun memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat sekitar berupa manfaat kebersihan, kesehatan dan juga ekonomi. Pengelolaan sampah yang baik tentu dapat berimbas pada peningkatan nilai dari sampah itu sendiri. Oleh karenanya, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah ini perlu dikembangkan agar mencapai tujuannya sebagai salah satu upaya pembangunan daerah yang memperhatikan aspek keberlanjutan.

Program Bank Sampah ini tentu merupakan suatu usaha yang baik dalam upaya penanggulangan serta pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang.

Terutama dengan konsep Bank Sampah yang mengikutsertakan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya dan menjadikan masyarakat sebagai subjek utama dalam program tersebut. Harapannya, dengan adanya program Bank Sampah ini masyarakat dapat lebih peduli akan kebersihan lingkungan, lebih memahami cara mengelola sampah dengan baik dan benar serta adanya perubahan *mindset* masyarakat tentang sampah.

Oleh karenanya, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah dan untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan evaluasi program Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai upaya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program Bank Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana evaluasi program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Bank Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan evaluasi program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan untuk kepentingan teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep tentang program Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pembangunan berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam administrasi publik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kajian akademik dan mampu memberikan gambaran secara mendalam kepada pembaca tentang evaluasi program Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Semarang.

b. Bagi Penulis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat semakin menambah wawasan dan referensi yang berhubungan dengan evaluasi program

Bank Sampah, khususnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.

c. Bagi pembaca

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan menganalisis masalah-masalah aktual yang terjadi berhubungan dengan evaluasi program Bank Sampah, khususnya dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang sebagai upaya pembangunan berkelanjutan.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama Peneliti dan Tahun Penulisan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Waste Management Strategies for Sustainable Development</i> Oleh: Calvin Wan, Geoffrey Qiping Shen, Stella Choi	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menekankan bahwa pengelolaan sampah yang berkelanjutan sangat penting dan memungkinkan sosial ekonomi yang lebih stabil serta berpengaruh besar pada lingkungan dan kesehatan secara keseluruhan. Institusi Pendidikan Tinggi atau <i>Higher Education Institutions (HEIs)</i> pun memiliki peran penting dalam memimpin peran transisi masyarakat dalam hal tersebut.	Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda
2.	<i>Waste Management in the Context of Sustainable Development: Case Study in Romania</i> Oleh: Monica Izvercian, Larisa Ivascu	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah padat kota di Romania mengalami perbaikan dan merupakan prioritas dalam strategi pembangunan nasional. Dalam pengimplementasian strategi pengelolaan limbah tersebut, dilakukan beberapa hal. Misalnya pengurangan jumlah sampah dan penerapan 3R. Pengelolaan sampah ini dinilai sebagai kunci dalam penggunaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan di Romania.	Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda

3.	<p>Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah (Studi di Bank Sampah Sumber Rejeki Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto Kota Kediri</p> <p>Oleh: Merly Mutiara Saputri, Imam Hanafi, Mochammad Chazeinul Ulum</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi dampak kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah melalui Bank sampah menunjukkan hasil yang cukup baik. Dilihat dari peran DKP Kota Kediri sebagai penyedia sarana dan prasarana, DKP Kota Kediri juga selalu melakukan pemantauan pada tiap kelompok Bank Sampah di Kota Kediri. Namun yang digaris bawahi adalah pemerintah Kota Kediri harus terus melakukan sosialisasi serta menghimbau masyarakat agar program tersebut dapat berdampak lebih signifikan.</p>	<p>Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda.</p>
4.	<p>Analisis Potensi Pembentukan Bank Sampah Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus: Dusun Celungan, Desa Sapen, Kecamatan Mojojaban, Kabupaten Sukoharjo)</p> <p>Oleh: Yogi Pasca Pratama, Bhimo Rizky Samudro, Sutomo.</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dasar pendirian Bank Sampah adalah kesadaran masyarakat. Perubahan paradigma akan sampah juga terlihat dari semua Bank Sampah yang telah mapan. Masyarakat juga mengalami perubahan pola pikir dan perilaku terkait sampah. Walau begitu, manajemen yang dilakukan pengelola masih kurang baik.</p>	<p>Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda.</p>

5.	Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari Oleh: Faturachman Alputra Sudirman, Phradiansah	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Kediri masih menghadapi tantangan di masing-masing aspek. Misal rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah juga keterbatasan armada serta sumber daya manusia dari pihak pemerintah terkait pengelola sampah. Namun terlepas dari itu semua, implementasi kebijakan pengelolaan sampah, terutama dengan Bank Sampah, telah memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan yaitu pada aspek ekonomi, sosial serta aspek lingkungannya sendiri.	Penelitian ini memiliki fokus dan lokus yang berbeda.
----	--	-----------------------	--	---

1.5.2 Administrasi Publik

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*”, yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani. Terdapat banyak ahli yang mengemukakan pengertian administrasi publik, diantaranya sebagai berikut:

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik serta suatu proses untuk mengatur keputusan dalam kebijakan publik dan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan urusan publik untuk memecahkan masalah publik.

John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus dalam Inu Kencana Syafii (2010:23-24) mendefinisikan administrasi publik meliputi: (1) implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha-usaha perseorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, (3) secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahannya, kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Nicholas Henry dalam Keban (2014:6) mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Dari penjelasan beberapa ahli di atas mengenai pengertian administrasi publik maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah serta mengkoordinir sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan berupa memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Paradigma yang muncul merupakan sudut pandang ahli tentang peranan dan tantangan Administrasi Publik dalam menjawab masalah yang muncul.

Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang. Karena ilmu pengetahuan itu sifatnya nisbi atau relatif (tidak mutlak), walaupun salah satu persyaratan harus dapat diterima secara universal, namun kurun waktu tertentu tetap memiliki perubahan, termasuk ilmu-ilmu eksakta sekalipun. Hanya ilmu-ilmu eksakta memang cenderung objek-objek, fakta-fakta, dan hukum-hukumnya relatif lebih lama untuk tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi, relatif lebih pasti dibanding ilmu-ilmu sosial.

Thomas S. Kuhn mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.

Nicholas Henry dalam Yeremias T. Keban (2014:31) mengungkapkan bahwa telah terjadi lima paradigma dalam administrasi negara seperti diuraikan berikut ini.

Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokoh dari paradigma tersebut adalah Frank Goodnow dan

Leonard D. White. Pemisahan antara politik dan administrasi diwujudkan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan perumusan kebijakan. Dengan demikian, paradigma ini menekankan bahwa adanya pemisahan antara politik dan administrasi, yaitu dimana politik merupakan sebagai badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat dalam bentuk kebijakan, dan administrasi sebagai badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak dari badan legislatif tersebut. Lokus dalam paradigma ini ialah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokus dalam paradigma ini abstrak karena kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam paradigma ini adalah Willoughby, Gullick dan Urwick yang memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) yang dapat diterapkan dimana saja, atau bersifat universal. Sedang lokus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip

tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintah. Pada intinya dalam paradigma ini lebih menekankan fokus daripada lokus.

Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Dalam paradigma ini terjadi pertentangan antara anggapan mengenai *value-free administration* di satu pihak dengan anggapan *value-laden politics* di lain pihak. Dalam praktek, anggapan kedua yang berlaku. Oleh karena itu, John Gaus secara tegas mengatakan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga merupakan teori politik, sehingga muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya kabur atau abstrak karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Prinsip-prinsip administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia administrasi publik. Paradigma ke-3 melihat bahwa administrasi publik dan politik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini ialah kabur karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dibanding prinsip-prinsip administrasi publik, sehingga prinsip-prinsip administrasi publik menjadi krisis identitas. Adapun lokus dalam paradigma ini sudah jelas, yaitu birokrasi pemerintahan.

Paradigma 4 (1956-1970) adalah Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah

populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik. Oleh karena itu, lokusnya menjadi tidak jelas.

Paradigma 5 (1970-sekarang) merupakan paradigma yang disebut sebagai Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara. Paradigma tersebut telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik. Administrasi negara telah tumbuh menjadi sistem penyelenggaraan kebijakan publik dan semakin penting peranannya dalam proses kebijakan publik. Setiap unsur aparatur negara termasuk birokrasi di dalamnya, apapun posisinya dari staf hingga jabatan tertinggi, memiliki peran dalam proses kebijakan publik sesuai batas kewenangannya masing-masing. Peran dan tanggung jawab aparatur negara atau administrator negara dalam proses

kebijakan publik menjadi semakin besar seiring dengan meningkatnya posisi dan jenjang jabatan pemerintahan yang diembannya.

Berdasarkan penjelasan mengenai paradigma administrasi publik, dalam penelitian ini mengarah pada paradigma ke-5 atau paradigma terakhir. Paradigma ke-5 telah memiliki fokus dan lokus yang jelas dari administrasi publik. Fokus administrasi publik dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan evaluasi program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dalam pengelolaan sampah melalui Program Bank Sampah sebagai upaya pembangunan berkelanjutan, sedangkan lokusnya ialah Kabupaten Semarang khususnya pada Bank Sampah Soka Resik, Dusun Soka, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki definisi yang beragam di berbagai literatur, hal ini wajar terjadi karena pada setiap disiplin ilmu para ahli memiliki cara pandang yang berbeda. Oleh beberapa ahli, kebijakan publik didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Thomas R. Dye dalam Inu Kencana Syafii (2010:105), kebijakan didefinisikan sebagai “*what government choose to do or not to do*”. Yang

artinya, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan.

Menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Sedangkan William N. Dunn dalam Inu Kencana Syafii mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Secara garis besar, cakupan kebijakan publik adalah tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dan dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kegiatan yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah dalam rangka memecahkan masalah publik yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam prosesnya, pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karenanya, proses penyusunan kebijakan publik dibagi menjadi beberapa tahapan oleh sejumlah ahli politik yang menaruh minat dalam pengkajian

kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Walau begitu, beberapa ahli bisa saja membagi tahap-tahap tersebut dengan urutan yang berbeda. Misalnya, tahap penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagan di bawah ini bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik, sebab masih ada satu tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau penghentian kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik yang dimaksud adalah tahapan kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini, masalah yang ada ditempatkan pada agenda publik oleh para pejabat yang berwenang. Masalah-masalah ini sudah berkompetisi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan. Dan pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Dalam tahap ini bisa saja suatu masalah tidak tersentuh sama sekali, sedangkan masalah lain ditetapkan sebagai fokus pembahasan. Ada pula masalah yang ditunda karena alasan-alasan tertentu untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Setelah mendefinisikan masalah-masalah tersebut, pemecahan masalah terbaik pun dicari. Pemecahan masalah

tersebut berasal dari berbagai *alternative* atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada.

Dalam proses perumusan kebijakan, alternatif-alternatif tersebut bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil guna memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dengan berbagai alternatif kebijakan yang ditawarkan, pada akhirnya hanya akan dipilih salah satu alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Keputusan yang diambil sebagai alternatif pemecahan masalah kemudian akan di implementasikan atau dilaksanakan oleh badan-badan yang ditentukan. Hal ini dilakukan agar program kebijakan tidak hanya menjadi catatan-catatan elit saja tanpa benar-benar dilaksanakan. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah diimplementasikan akan dievaluasi atau dinilai untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah yang ingin dipecahkan. Pada dasarnya, kebijakan publik dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, guna memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karenanya, ditentukanlah ukuran atau kriteria dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Dari beberapa tahapan kebijakan publik yang dijelaskan diatas, penulisan penelitian ini akan difokuskan pada tahap evaluasi yaitu evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah melalui Program Bank Sampah sebagai upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Semarang, khususnya di Bank Sampah Soka Resik, Dusun Soka, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

1.5.5 Evaluasi Kebijakan

1.5.5.1 Pengertian Evaluasi

Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000:220).

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi.

Bila kebijakan dipandang sebagai pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Walau demikian, ada pula beberapa ahli yang beranggapan bahwa evaluasi belum tentu merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil maksimal sesuai yang diinginkan. Menurut James Anderson (1969:151), evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

1.5.5.2 Tujuan Evaluasi

Menurut Subarsono (2003:120-121) evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

1.5.5.3 Fungsi Evaluasi

William Dunn (1998:608-609) mengemukakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting antara lain:

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.
2. Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ada perlu diganti atau diperbaharui.

1.5.5.4 Indikator Evaluasi

Dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat *bias* dari yang sesungguhnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan perspektif *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan. Dimana indikator yang paling tepat digunakan adalah indikator yang disampaikan *United Nation* (UN) atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui *World Conference on Environment and Development* (WCED) dalam *Brundtland Report* (Laporan Brundtland). Didalam laporan tersebut, disebutkan bahwa ada tiga indikator atau aspek utama dalam pembangunan berkelanjutan yaitu indikator atau aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Indikator-indikator tersebutlah yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep pembangunan yang sangat berkembang di berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir. Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh *United Nation* (UN) atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui sebuah konferensi bernama *Conference on the Human Environment* di Swiss, lebih tepatnya di Stockholm pada 1972. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Berangkat dari konferensi di Stockholm ini, PBB melalui *World Conference on Environment*

and Development (WCED) pada tahun 1987 mempublikasikan sebuah laporan yang berjudul *Our Common Future* atau *Brundtland Report* yang didalamnya memuat mengenai konsep pembangunan berkelanjutan.

Menurut laporan tersebut, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai proses pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pada masa sekarang dengan tidak mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam perkembangannya, pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* memiliki berbagai definisi. Namun, sesuai dengan *Brundtland Report* dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan ini adalah proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan sebenarnya mencakup berbagai aspek, yaitu: keberlangsungan, ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik serta pertahanan dan keamanan. Namun dispesifikan dalam *Brundtland Report* (WCED, 1987) dalam tiga aspek yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi.

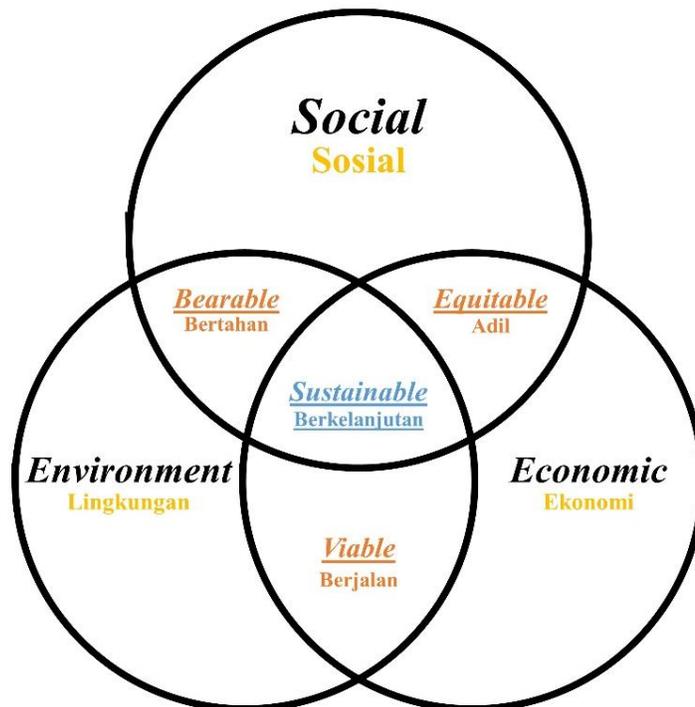
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengartikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan

lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dari berbagai definisi pembangunan berkelanjutan yang ada, dapat diintisarikan bahwa pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk pencapaian tidak hanya keberlanjutan bidang ekologi atau lingkungan akan tetapi keberlanjutan di bidang sosial dan ekonomi.

Model pembangunan berkelanjutan sesuai yang disampaikan oleh *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) dalam Todoror dan Marinova (2011) seperti tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1. Model Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: IUCN

Model pembangunan berkelanjutan seperti yang disebutkan pada Gambar 1 dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan, yang ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat. Aspek yang satu akan mengakibatkan aspek yang lainnya terpengaruh. Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (*bearable*). Ketiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan (*sustainable*).

Pada perkembangannya, konsep pembangunan berkelanjutan ditinjau ulang di tahun 2015 pada *United Nation (UN) Conference on Sustainable Development* di New York membahas Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) dengan 17 Tujuan Pembangunan Milenium baru yang bertujuan untuk dicapai pada tahun 2030 menekankan arah pembangunan berkelanjutan yang berbasiskan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan lingkungan hidup, sosial dan ekonomi (*United Nations General Assembly, 2015*). Tujuan-tujuan tersebut secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Sustainable Development Goals (SDGs)



Sumber: Webstite United Nation (un.org)

Dari 17 tujuan yang ada, beberapa diantaranya memiliki relevansi dengan permasalahan lingkungan. Secara spesifik, permasalahan sampah menjadi sorotan dalam SDGs pada tujuan ke 11.6 yang diperjelas dalam indikator 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. Indikator persentase sampah perkotaan yang tertangani adalah persentase jumlah sampah perkotaan yang ditangani dibandingkan dengan jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan. Indikator ini digunakan untuk meningkatkan jumlah penanganan sampah perkotaan dalam mengurangi dampak lingkungan dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan kota. (Badan Pusat Statistik, 2017).

1.5.6 Pengelolaan Sampah

Permasalahan di sektor lingkungan saat ini terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan yang menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. Pencemaran tersebut disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia. Perkembangan masyarakat, baik jumlah maupun intensitas dan variasi kegiatan yang dilakukan berdampak pada degradasi kelestarian lingkungan. Salah satu permasalahan nyata yang merupakan akibat dari peningkatan aktivitas manusia adalah sampah.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dalam Bahasa Inggris disebut *waste*, yaitu material atau bahan yang dianggap oleh pemiliknya sudah tidak mempunyai kegunaan atau nilai ekonomis sehingga harus dibuang. Jika dikaitkan dengan perspektif lingkungan yang lingkupnya lebih luas, sampah dimaknai sebagai bahan yang dalam keadaan biasa atau khusus tidak bisa digunakan karena tidak bernilai akibat cacat, rusak atau berlebihan sehingga harus dibuang.

Sastrawijaya, A Tresna (2000:73) mendefinisikan sampah sebagai bahan yang tidak dipakai lagi, karena telah diambil bagian utamanya dengan

pengolahan, menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomis tidak ada harganya.

Selanjutnya, Apriadji (1991:1) menjelaskan bahwa sampah adalah zat-zat atau benda-benda yang tidak dipakai lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga maupun dari pabrik sebagai sisa proses industri.

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau sesuatu yang tidak memiliki nilai atau mengalami pengurangan nilai.

Proses timbulnya sampah adalah konsekuensi alami dari kehidupan manusia yang terus berkembang. Industrialisasi masif yang menyebabkan migrasi dan urbanisasi juga turut meningkatkan produksi sampah padat (*solid wasted*) setiap harinya terutama di daerah perkotaan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Jumlahnya terus meningkat secara signifikan sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengejar status sebagai negara industri pada tahun 2020.

Oleh karenanya, sampah-sampah tersebut perlu dikelola agar keberadaannya tidak merugikan lingkungan maupun makhluk hidup disekitarnya. Pengelolaan sampah ini diartikan sebagai semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah merupakan salah satu cara efektif untuk mencegah penumpukan sampah di pembuangan akhir.

Sampah serta pengelolaannya juga salah satu hal yang beberapa kali disebutkan dalam indikator *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh *United Nation* (UN) atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Hal ini tentu disebabkan karena lingkungan secara umum merupakan salah satu hal yang difokuskan pada perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Di Indonesia, hal ini juga sejalan dengan salah satu pilar SDGs atau *Sustainable Development Goals* yang dikemukakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam salah satu dokumen berjudul ‘Metadata Indikator: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia’ edisi II pada tahun 2020, yaitu Pilar Pembangunan Lingkungan, yang tujuannya adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar ini terdiri dari 6 tujuan SDGs. Yaitu Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan), Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab), Tujuan 14 (Ekosistem Lautan) dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan). Terdapat 4 Target yang berkaitan dengan sampah dan pengelolaannya yang didalamnya dibagi lagi menjadi 6 indikator yang menjelaskan secara detail terkait hal-hal tersebut. Penjelasan terkait target serta indikator-indikator tersebut disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Indikator SDGs Terkait Sampah dan Pengelolaan Sampah

Target	Indikator	
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya
	11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	12.3.1	(a) Indeks kehilangan makanan (<i>Food loss index</i>); dan (b) Indeks sampah makanan (<i>Food waste index</i>)
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.	14.1.1 (a)	(a) Indeks eutrofikasi pesisir; dan (b) kepadatan sampah plastik terapung
	14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut

Sumber: Website sdgs.bappenas.go.id

Dalam penjelasan Tabel 3 diatas, dapat disimpulkan bahwa usaha dalam mengelola sampah merupakan salah satu hal yang juga penting dilakukan baik dalam skala kecil maupun besar dan mencakup berbagai kategori. Pengelolaan sampah sendiri juga merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan yang ada pada *Sustainable Development Goals*.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pada Pasal 3 dan 4 Undang Undang tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Dalam Pasal 12, dijelaskan bahwa setiap orang diwajibkan melakukan pengelolaan atau memilah sampah dengan cara atau metode yang berwawasan lingkungan. Metode tersebut adalah 3R, yaitu:

1. *Reduce* (Membatasi Sampah)

Segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah. Dalam arti tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan, juga berarti mengurangi pembelian barang-barang yang tidak diperlukan sebagai upaya pengurangan sampah secara umum. Serta diartikan pula sebagai pengurangan konsumsi produk yang tidak dapat didaur ulang maupun menghasilkan sampah dalam jumlah besar serta mengurangi penggunaan bahan sekali pakai.

2. *Reuse* (Menggunakan Kembali)

Segala kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain. Disebut juga sebagai upaya pemanfaatan sampah yang dilakukan dengan memanfaatkan kembali sampah-sampah tersebut tanpa dilakukan sebuah proses serta transformasi baru.

3. *Recycle* (Mendaur Ulang)

Kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Sampah yang ada dapat dimanfaatkan secara langsung, diproses serta diolah untuk dapat dimanfaatkan, kemudian diproses atau diolah sebagai bahan baku.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah, pelaksanaan 3R salah satunya dapat dilakukan melalui Bank Sampah.

1.5.7 Bank Sampah

Menurut Buku Panduan Sistem Bank Sampah oleh Unilever, Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

Menurut Pasal 1 (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah, Bank Sampah diartikan sebagai tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Dari dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Sampah merupakan konsep pengelolaan sampah dengan mengikutsertakan masyarakat dan memiliki keuntungan ekonomi bagi masyarakat sendiri. Bank sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilih menurut jenis sampah, sampah yang ditabung pada Bank Sampah adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Cara kerja Bank Sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, manajemen pengelolaannya dan pencatatan pembukuan. Nasabah dalam hal ini adalah seluruh warga baik secara individual maupun kelompok. Nasabah dibuktikan dengan kepemilikan nomor rekening serta buku tabungan sampah, serta berhak atas hasil tabungan sampahnya. Manajemen pengelolaannya tergantung dengan Bank Sampah masing-masing. Umumnya, di dalam pengelolaan Bank Sampah terdapat *teller*, yaitu petugas Bank Sampah yang bertugas melayani penabung sampah antara lain menimbang berat sampah, melabeli sampah, mencatat dalam buku induk, dan berkomunikasi dengan pengepul. Pengepul adalah perseorangan dan/atau lembaga yang masuk dalam sistem pengelolaan sampah dengan tabungan

sampah dan menilai secara ekonomi setiap sampah yang ditabung oleh warga baik individual maupun kelompok. Pengelolaan sampah dengan sistem tabungan sampah di Bank Sampah, menekankan pentingnya warga memilah sampah seperti yang dikembangkan dalam pengelolaan sampah dengan sistem mandiri dan produktif. Pencatatan pembukuan di daerah biasanya dilakukan secara manual dengan buku-buku tabungan dengan nama nasabah serta keterangan berat sampah setiap menabung. Semua kegiatan dalam sistem Bank Sampah dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Konsep Bank Sampah ini menjadi salah satu solusi bagi pengelolaan sampah di Indonesia yang masih bertumpu pada pendekatan akhir. Dengan program ini, sampah mulai dikelola dari awal sumber timbunan sampah, yaitu rumah tangga. Pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat sejak awal membuat timbunan sampah yang dihasilkan dan dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi berkurang (Medan Green dan Clean, 2010). Hal ini tentu sangat membantu dalam upaya pelestarian lingkungan dengan pengurangan sampah dan juga dalam mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan.

1.6 Fenomena Penelitian

Fenomena dapat diartikan sebagai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan. Fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan serta evaluasi program

Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Semarang dengan mengacu pada tiga indikator pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi. Indikator tersebut digunakan karena penulis menggunakan perspektif pembangunan berkelanjutan, dimana indikator yang paling tepat digunakan adalah indikator yang disampaikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Variabel yang akan diteliti perlu dilaksanakan dalam bentuk rumusan yang lebih operasional sehingga mempunyai ukuran yang sesuai dan tidak membingungkan. Adapun operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1.	Pelaksanaan Program	1.1 Pelaksanaan Program Bank Sampah 1.2 Dukungan Edukasi 1.3 Dukungan Pendampingan, Pembinaan dan Monitoring 1.4 Dukungan Sarana dan Prasarana
2.	Evaluasi Program	1.1 Aspek Lingkungan 1.2 Aspek Sosial 1.3 Aspek Ekonomi

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan perspektif evaluasi kebijakan. Sugiono (2012:9) mengemukakan penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Bungin (2007:68) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang fenomena tertentu.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan penetapan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini mengambil lokus di Kabupaten Semarang khususnya pada Bank Sampah Soka Resik, Dusun Soka, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan berfokus pada studi kasus tentang (1) Pelaksanaan program Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah di Kabupaten Semarang, dan (2) Evaluasi program Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah sebagai upaya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Semarang.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan penulis dapat menceritakan apa yang diketahui tentang sesuatu yang sangat berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti. Dengan kata lain dapat disebut sebagai informan. Moleong (2007) mendeskripsikan informan sebagai orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Oleh karenanya, dipilihlah informan berikut ini:

Tabel 5. Data Informan

No	Informan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
1.	Informan 1	Drs. Budi Rahardjo	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
2.	Informan 2	Eka Yuliyanti, S.Si., M.M	Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
3.	Informan 3	Ina Yuliana, S.K.M	Tenaga Fasilitator Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang
4.	Informan 4	Richard Eko Nugroho	Direktur Bank Sampah Soka Resik
5.	Informan 5	Triutari	Pengurus Bank Sampah Soka Resik
6.	Informan 6	Hayu Sulastriningsih	Masyarakat Dusun Soka
7.	Informan 7	Ngatini	Masyarakat Dusun Soka

1.7.4 Jenis Data

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, maka jenis data yang digunakan serta dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis, teks, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini pun akan berisi hal-hal tersebut.

1.7.5 Sumber Data

Sumber pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi atau pengamatan secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan pihak Bank Sampah Soka Resik.
2. Data Sekunder, yang merupakan data yang tidak diperoleh dari sumbernya misal berupa catatan majalah, surat kabar, dokumen, laporan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti serta sebagai sumber kedua atau sumber sekunder untuk mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa tabel, laporan dan dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan Bank Sampah Soka Resik yang berguna untuk penelitian ini.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data (dalam Sugiyono, 2014:224) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, antara lain:

1. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian yang diamati tersebut.

2. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2014) mendefinisikan wawancara berupa pertemuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg mengemukakan tiga jenis wawancara yaitu; wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara semistruktur. Wawancara ini termasuk dalam

kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Penulis melakukan wawancara ini terhadap 7 (tujuh) informan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Dokumen

Menurut Sugiyono (2009) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau lainnya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dan bagan. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Penulis menggunakan dokumen berupa catatan-catatan, rekaman, dan foto dari informan.

1.7.7 Analisa Data

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang terkumpul kemudian diolah oleh penulis. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian. Dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui analisis data di lapangan Model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016:246), yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting kemudian dicari tema dan polanya. Pada tahap ini penulis memilah informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, hubungan antar kategori, teks yang bersifat naratif dan lainnya.

3. *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan di awal biasanya masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jadi kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang.

1.7.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak. Moleong dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif” menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, ada beberapa cara untuk memiliki standar kredibilitas yang baik salah satunya adalah melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam Moleong (2007:330), triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara khusus untuk penulisan penelitian ini, yaitu:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
Penulis membandingkan hal-hal yang diamati berupa informasi dan juga yang ada di media dengan hasil wawancara oleh informan.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan masyarakat atau pelaku usaha dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu temuan di antara kedua pihak tersebut.